

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah yang sangat besar. UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Selain itu, kelompok ini juga tahan terhadap berbagai ancaman krisis moneter pada tahun 1997 banyak perusahaan besar yang tumbang, tetapi UMKM justru tidak goyah dan malah menjadi tulang punggung perekonomian pada saat itu, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan meskipun tidak signifikan.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, data terbaru tahun 2018 yang dilansir dari situs resminya www.depkop.go.id menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia mencapai 64,1 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 97% atau sekitar 116,9 juta tenaga kerja yang ada saat itu di Indonesia. Dari data tersebut dapat diketahui pula bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu sebesar 60,1% dari seluruh unit usaha. Dari besarnya data diatas, mencerminkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negeri ini sehingga keberadaannya sangatlah penting dan harus diberi perhatian lebih oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan lebih akurat dan relevan. Selain itu, dengan menyusun laporan keuangan dengan jelas dan akurat maka pelaku UMKM mempermudah dalam pengisian SPT dan penambahan modal usaha. Dengan masalah tersebut, maka IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan standar akuntansi khusus untuk usaha mikro kecil menengah untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan.

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Namun kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai standar.(Mulyaga, 2016). Dengan adanya laporan keuangan yang sesuai standar maka dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu memberikan informasi yang reliable dan akuntabel mengenai posisi keuangan UMKM, sebagai bahan untuk

menilai kinerja UMKM, dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan UMKM dapat diwujudkan, (Armando, 2014).

Namun, praktek akuntansi pada UMKM di Indonesia masih sangat rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Benyamin (2006) seperti di kutip Wadini dan Suhairi (2006) menyimpulkan bahwa rendahnya penggunaan dan pemahaman praktek akuntansi tersebut di Indonesia di sebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manager pemilik. Sedangkan Muntoro (1990) seperti dikutip wadini dan Suhairi (2006) menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut disebabkan tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM membuat proses pembukuan laporan keuangan terlambat.

Untuk mengatasi masalah tersebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 menerbitkan sebuah standar akuntansi keuangan yang dapat memudahkan dan membantu UMKM dalam menyusun sebuah laporan keuangan dan berlaku efektif pada tanggal 01 januari 2010, yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik) (Alfitri, Ngadiman, & Sohidin, 2014). SAK-ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu: 1) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. 2) tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Penyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP lebih mudah dipahami dan lebih sederhana disbanding PSAK pada

umumnya. Tetapi masi banyak UMKM yang melakukan pembukuan tidak sesuai dengan SAK-ETAP. Pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan sesuai SAK-ETAP karena mereka kesulitan.

Kesulitan tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) kurangnya sosialisasi penerapan SAK-ETAP dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Koperasi dan UMKM sehingga pelaku usaha tidak mengetahui tentang standar yang harus mereka jadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, atau pelaku usaha yang sudah mengetahui tetap tidak melaksanakan kerana dirasa merepotkan apabila harus menyusun laporan keuangan sesuai SAK-ETAP. 2) omzet penjualan dari UMKM yang terkadang tidak jelas karena tidak adanya pemisahan antara uang pribadi dengan usaha dapat menyebabkan ketidak terlaksananya SAK-ETAP. 3) tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku usaha merasa perlu tidak melakukan pembukuan sesuai dengan SAK-ETAP. 4) banyak pelaku UMKM yang tidak melakukan SAK-ETAP karena merasa masih baru mulai usaha. 5) banyak juga UMKM yang beranggapan bahwa penerapan SAK-ETAP memerlukan tenaga ahli dan teknologi sehingga memerlukan biaya tambahan untuk melakukannya.

Secara umum SAK-ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum, (Rudiantoro & Siregar 2012). Walaupun cukup ringkas namun tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini.

Salah satu UMKM yang masih kesulitan dalam penerapan SAK-ETAP bagi usahanya adalah UMKM pengrajin Mebel. Seperti yang kita ketahui bersama kerajinan ukir merupakan industri khas bagi Kecamatan Kelapa Lima. Industri

kerajinan mebel juga industri yang paling berpotensi di Kecamatan Kelapa Lima, sehingga tidak mengherankan apabila mayoritas masyarakat Kelapa Lima berpotensi sebagai pengrajin mebel.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAK-ETAP (2009) yaitu: relevan, mudah dipahami, keandalan, kelengkapan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, materialitas, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Namun demikian kenyataan yang terjadi banyak perusahaan UMKM yang masih belum melakukan pencatatan sebagaimana mestinya dan melakukan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK-ETAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012) yang mengungkapkan bahwa UMKM tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan tetapi perusahaan mampu mengatasi masalah permodalan dengan kemampuan mengakses kredit dari perbankan.

Demikian juga dengan hasil penelitian Tyas dan Fachriah (2012) yang menyebutkan bahwa penyusunan laporan aset biologis perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP. Dari kedua penelitian tersebut maka diketahui bahwa beberapa perusahaan UMKM tidak menerapkan SAK-ETAP. Hal tersebut terjadi karena kurang efektifnya sosialisasi pemerintah dalam mengenalkan SAK-ETAP bagi UMKM, sehingga masih banyak perusahaan UMKM yang tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan.

Namun, hingga saat ini penerapan SAK-ETAP masih sangat rendah. SAK-ETAP juga masih banyak dianggap memberatkan usaha kecil dan menengah

Sariningtyas dan Diah (2011). Penyebab karena pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai, dan belum mengetahui pentingnya menyusun laporan keuangan bagi kelangsungan usahanya. Banyak pengusaha kecil yang menganggap laporan keuangan tidaklah penting sehingga mereka mengabaikan cara pengungkapan laporan keuangan usaha mereka dan apabila tidak dilaksanakan tidak disiplin setiap bulan dalam penyampaiannya. Walaupun terlihat sangat sepele namun hal ini dapat menjadi masalah yang besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih minimnya kesadaran para pelaku UMKM di dalam pembuat laporan akuntansi. Seperti kurangnya SDM yang di dalam melakukan pembukuan, serta biaya yang dirasa cukup tinggi yang harus di keluarkan untuk melakukan hal tersebut. Banyak UMKM yang belum sadar akan pentingnya pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dalam usahanya karena terlalu focus pada proses produksi dan operasionalnya (Mulya, 2016)

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dari beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum sebagai landasan penelitian, sebagai berikut:

Nurita Budi Pratiwi & Rustam Hanafi (2016) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK-ETAP pada UMKM. Penelitian ini menggunakan

sampel sebanyak 64 UMKM sebaran di Daerah Tegal. Variabel penelitian ini adalah IFRS ETAP sebagai variabel dependen. Pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif keuangan, dan ukuran bisnis sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif keuangan dan ukuran bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK-ETAP pada UMKM. Artinya semakin tinggi pendidikan pemilik, semakin tinggi memahami informasi teknologi, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan ukuran bisnis, semakin baik penerapan IFRS ETAP.

Nevi Selfiana Safitri (2021) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus: pengrajin mebel di Desa Rau Kecamatan Kedung kabupaten Jepara)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pemilik, informasi dan sosialisai SAK ETAP, ukuran usaha, serta umur usaha terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM pengrajin mebel desa Rau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM pengrajin mebel Di Desa Rau yang berjumlah 55 UMKM. Dalam penelitian ini terdapat empat (4) variabel yaitu tingkat pendidikan pemilik, informasi dan sosialisasi SAK ETAP, ukuran usaha serta umur usaha sebagai variabel Independen dan implementasi SAK ETAP sebagai variabel dependen. Hasil

penelitian ini menunjukkan variabel tingkat pendidikan pemilik, informasi dan sosialisasi SAK ETAP dan ukuran usaha berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP. Sedangkan variabel Umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP.

Industri kecil telah berkembang sejak tahun 1986 yang dikembangkan oleh 12 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah industry sebanyak 367 usaha di kota kupang tercatat lebih dari 100 industri kecil yang terus berkembang hingga saat ini melewati krisis ekonomi. Perkembangan industri kecil di kota kupang sendiri tercatat sangat baik. Industri kecil mampu memberikan kontribusi pada perekonomian Kota Kupang khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Industri mebel merupakan salah satu industri yang mempunyai peranan paling penting bagi perekonomian dalam memberi kontribusi dalam penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat kota kupang. Berikut penyebaran industri mebel menurut kecamatan di kota kupang pada tahun 2021 disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Penyebaran Industri Mebel Menurut Kecamatan Di Kota Kupang Tahun
2021

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan (unit)
1	Kelapa Lima	83
2	Kota Lama	8
3	Kota Raja	30
4	Maulafa	42
5	Oebobo	62
6	Alak	50

Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan kota kupang (2021)

Industri kecil yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan diharapkan sebagai sumber pendapatan keluarga dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, industri kecil juga mengalami hambatan dan faktor-faktor ekonomi dan dalam menghadapi perdangan bebas, sektor industri perlu dipersiapkan secara khusus dalam menghadapi liberalisasi perdagangan agar bias bias bersaing dengan Negara luar. Kurangnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP dan rendahnya pengetahuan tentang Akuntansi merupakan faktor penyebab kurang berkembangnya industri kecil seperti industri mebel.

Permasalahan yang sering dihadapi industri kecil adalah keterbatasan modal, sebagian besar modal usaha industri kecil mebel kayu di Kecamatan Kelapa Lima ialah modal pribadi dan belum banyak yang memanfaatkan modal pinjaman dari lembaga keuangan yang ada. Hal ini, dikarenakan industri kecil mebel kayu di Kecamatan Kelapa Lima sebagian besar masih kesulitan dalam menerapkan SAK

ETAP dikarenakan belum banyak yang memahami tentang penyusunan laporan keuangan yang berdampak juga pada perkembangan usaha serta pemasaran hasil usahanya dan signifikan mengalami penurunan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan Judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada UMKM”

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut, maka peneliti dapat menarik masalah penelitian dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada UMKM”

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka peneliti dapat mengambil persoalan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah latar belakang pendidikan mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima?
- b. Apakah ukuran usaha mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima?

- c. Apakah lama usaha mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh faktor latar belakang pendidikan terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima.
- b. Untuk mengetahui pengaruh faktor ukuran usaha terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima.
- c. Untuk mengetahui pengaruh faktor lama usaha terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima

1.5 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Umkm Pengrajin Mebel Kecamatan Kelapa Lima.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.

2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk pemahaman diri peneliti dalam menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan skripsi.
3. Bagi peneliti dan pihak-pihak yang memerlukan, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya.